

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN UMKM MASYARAKAT DESA GEDE PANGRANGO KECAMATAN KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI

Neni Rosmiati¹⁾, Iyan Sopyan²⁾

^{1,2} Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

email: nenirosmiati17@gmail.com, iyansopian04z@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan perkembangan UMKM adalah dengan memberikan bantuan permodalan melalui program dana desa, pelatihan manajemen usaha dan pemasaran bagi pelaku UMKM, serta memfasilitasi pameran untuk memasarkan produk UMKM. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam menjalankan perannya antara lain keterbatasan anggaran, minimnya pemahaman pelaku UMKM, serta kurang optimalnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan stakeholder terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi desa khususnya terkait pengembangan UMKM.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pemasaran, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Abstract

The purpose of this study was to analyze the role of the Village Government in improving the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Gede Pangrango Village, Kadudampit Sub-district, Sukabumi District. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The results showed that the role of the Village Government in improving the development of MSMEs is to provide capital assistance through the village fund program, business management and marketing training for MSME actors, and facilitate exhibitions to market MSME products. The obstacles faced by the Village Government in carrying out its role include budget limitations, lack of understanding of MSME actors, and less than optimal coordination between the Village Government and related stakeholders. This research is expected to be an input for the Village Government in formulating village economic development policies, especially related to the development of MSMEs.

Keywords: Increase in MSMEs, Local Government, Marketing

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia (Adlan, 2021) UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,34% dan penyerapan tenaga kerja hingga 97% pada tahun 2017 (Wilfarda et al., 2021). Dengan demikian, UMKM menjadi salah satu sektor ekonomi yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran.

Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan dalam pengembangan usahanya (Firman et al., 2022). Kendala umum yang dihadapi meliputi kesulitan akses terhadap sumber pendanaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya akses terhadap pasar dan teknologi serta birokrasi yang rumit. Kondisi ini menghambat pertumbuhan dan daya saing UMKM (Chalim et al., 2022).

Di sisi lain, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pembangunan ekonomi wajib memberikan dukungan bagi sektor UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara

optimal. Peran pemerintah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Fakhrurozi, 2023). Pasal 15 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah harus menumbuhkan iklim usaha melalui kebijakan yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan pendanaan serta fasilitasi jejaring dan kemitraan.

Dalam hal kebijakan, pemerintah diminta memberikan kemudahan perizinan serta mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung UMKM (Islami et al., 2021). Pemerintah juga harus memfasilitasi akses terhadap pendanaan melalui program-program kredit murah, bantuan modal awal serta jaminan kredit bagi UMKM. Tidak kalah pentingnya, pemerintah juga wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas usaha melalui bimbingan teknis, pelatihan dan magang bagi pelaku UMKM (Masruroh et al., 2021).

Meski begitu, realisasinya masih belum maksimal. Keterbatasan anggaran serta program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang optimal masih menjadi tantangan bagi peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM. Hal ini menyebabkan kontribusi positif berbagai program pemerintah belum dirasakan secara utuh oleh pelaku UMKM (Ondang et al., 2019).

Lewat penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas peran pemerintah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Penelitian akan difokuskan pada dua program utama, yaitu program pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program penguatan kapasitas melalui pusat layanan dan jejaring usaha yang melibatkan berbagai dinas dan kementerian.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menganalisa kesenjangan dan memberi masukan bagi peningkatan efektivitas program-program pemerintah yang menyokong pertumbuhan UMKM. Hal ini guna memastikan kebijakan pemerintah dapat memberi dampak nyata dalam membantu UMKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Peran pemerintah terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangatlah relevan mengingat pentingnya sektor UMKM dalam ekonomi suatu negara. UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM menjadi sebuah topik yang penting untuk diteliti dan di fahami lebih dalam.

Beberapa ini merupakan alasan mengapa peran pemerintah dalam pengembangan UMKM penting (Rahmat et al., 2020), diantaranya:

1. Kontribusi Ekonomi UMKM

UMKM menyumbang secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.

2. Penciptaan Lapangan Kerja

UMKM adalah salah satu penyedia lapangan kerja terbesar. Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, akses ke sumber daya, dan pembiayaan dapat membantu UMKM memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja.

3. Inovasi dan Kreativitas

UMKM sering kali menjadi tempat inovasi dan kreativitas yang mengarah pada pengembangan produk dan layanan baru. Pemerintah dapat mendorong inovasi ini melalui dukungan riset dan pengembangan serta perlindungan hak kekayaan intelektual.

4. Pemerataan Pendapatan

Pengembangan UMKM dapat membantu dalam pemerataan pendapatan karena sebagian besar UMKM didirikan oleh individu dari segmen ekonomi yang lebih rendah. Dukungan pemerintah dapat membantu mereka dalam mengatasi hambatan dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

5. Pengentasan Kemiskinan

UMKM dapat menjadi alat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan peluang ekonomi kepada kelompok yang kurang mampu.

6. Daya Saing Global

Pemerintah dapat membantu UMKM agar lebih siap menghadapi persaingan global dengan memberikan akses ke pasar internasional, bantuan dalam meningkatkan kualitas produk, dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial.

7. Keberlanjutan Lingkungan

Pemerintah dapat mendorong UMKM untuk berkontribusi pada praktik bisnis yang berkelanjutan secara lingkungan, misalnya dengan memberikan insentif untuk penggunaan teknologi ramah lingkungan.

8. Stabilitas Sosial

Pertumbuhan UMKM dapat membantu menciptakan stabilitas sosial dengan mengurangi angka pengangguran dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara berbagai lapisan masyarakat.

Terkait penelitian mengenai peran pemerintah terhadap pengembangan UMKM dapat dikaji berbagai aspek, termasuk kebijakan, program dukungan, peraturan akses pembiayaan, pelatihan, dan berbagai mekanisme lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesuksesan UMKM. Dengan memahami peran pemerintah yang efektif, suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan UMKM yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang mana pada pendekatan ini bertumpu pada analisis proses dari proses berfikir secara induktif. Penelitian kualitatif menurut Nugraha (Nugraha, 2023) adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Selanjutnya dalam (Amelia et al., 2023) menjelaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian. Jenis data dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data dalam jurnal ini merupakan hasil observasi langsung ke lapangan serta studi literatur atau kajian kepustakaan, wawancara dan dokumentasi (Moleong, 2013).

Metode observasi merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data-data dengan cara pengamatan langsung melalui indera mata (Nugraha et al., 2018). Sedangkan metode studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.

Dengan mengumpulkan data berbagai sumber bermutu setiap peneliti menjadikan kepustakaan sebagai bahan acuan atau pijakan untuk mengemukakan argumen yang selaras dengan teori. Wawancara merupakan serangkaian kegiatan yang berisikan beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mencari informasi atau data yang diinginkan kepada narasumber. Dan dokumentasi ialah pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen - dokumen yang telah diperoleh pihak desa.



Gambar 1. Dokumentasi Wawancara UMKM pada Kepala Desa Gede Pangrango

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kelurahan Gede Pangrango

Kelurahan Gede Pangrango merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan kadudampit, kabupaten sukabumi. Adapun batas-batas wilayah yuridis Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan bupati tentang Batas Wilayah Kecamatan Kadudampit dan Desa - desa Di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

No	Letak	Perbatasan
1	Sebelah Utara	Desa Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor dan Desa Cimacan Kec. Cipanas Kab.Cianjur
2	Sebelah Timur	Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit
3	Sebelah Selatan	Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit
4	Sebelah Barat	Desa Sukamanis dan Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit

Sumber: Data Peta Desa Pangrango

Kondisi Demografis Desa Gede Pangrango

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk			Keterangan
		Pria	Wanita	Juml	
Kelompok Umur					
1	0 – 4	237	226	463	Pertahun 2022
2	5 – 9	339	303	642	
3	10 – 14	325	322	647	
4	15 – 19	261	274	535	
5	20 – 24	315	313	628	
6	25 – 29	282	258	540	
7	30 – 34	280	304	584	
8	35 – 39	251	244	495	
9	40 – 44	277	286	563	
10	45 – 49	257	255	512	
11	50 – 54	232	240	472	
12	55 ke atas	556	526	1.082	
	Jumlah	3.612	3.551	7.163	
Tingkat Pendidikan Penduduk					
No	Tingkat Pendidikan				Jumlah
1	Belum sekolah				1.752
2	Tidak tamat SD/ sederajat				605
3	Tamat SD/sederajat				2.258
4	Tamat SLTP /sederajat				1.155
5	Tamat SLTA /sederajat				1.145
6	Diploma I/II				26
7	Akademi/Diploma III				43
8	Diploma IV/Strata I				171
9	Tamat Pasca Sarjana				20
Mata Pencaharian Penduduk					
No	Jenis Mata Pencaharian				Keterangan
1	Petani pemilik				√
2	Petani penggarap				√
3	Buruh tani				√
4	Peternak				√
5	Perindustrian kerajinan				√
6	Bidang jasa				√
7	Perdagangan				√
8	Pegawai negeri / ABRI				√
9	Lain-lain				√
Tingkat Produksi Penduduk					
No	Jenis Produksi				Keterangan

Sumber: Data Monografis Desa Gede Pangrango

Kendala Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Gede Pangrango, seperti di tempat lain, mungkin menghadapi beberpa kendala. Berikut adalah beberapa kemungkinan kendala yang dapat mempengaruhi pengembangan UMKM:

1. Keterbatasan Akses Modal

Salah satu kendala utama bagi UMKM adalah akses terhadap modal. UMKM mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman atau investasi yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka, terutama jika lembaga keuangan tidak memiliki kehadiran yang kuat di daerah tersebut (Ramadhanti et al., 2022).

2. Keterbatasan Mengelola Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dan mengembangkan usaha juga dapat menjadi kendala. Pelatihan dan pendidikan tentang manajemen usaha, pemasaran, dan aspek-aspek lainnya penting agar UMKM dapat tumbuh dan bersaing.

3. Pasar yang Terbatas

Jika Desa Gede Pangrango memiliki populasi yang relatif kecil atau jika pasar lokal tidak cukup besar, UMKM mungkin kesulitan untuk memperluas pangsa pasarnya. Hal ini dapat menghambat potensi pertumbuhan mereka.

4. Keterbatasan Teknologi dan Inovasi

UMKM yang belum mengadopsi teknologi modern atau kurang inovatif mungkin kesulitan dalam bersaing dengan pesaing yang lebih maju. Kurangnya akses terhadap teknologi dapat menghambat efisiensi operasional dan upaya pemasaran.

5. Pemasaran dan Branding

UMKM mungkin menghadapi tantangan dalam memasarkan produk atau jasa mereka, terutama jika mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pemasaran dan branding. Memperkenalkan produk kepada pelanggan potensial adalah langkah krusial untuk pertumbuhan UMKM (Islami et al., 2021).

6. Persaingan dengan Industri Besar

UMKM sering kali harus bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar. Persaingan ini dapat menjadi tantangan, terutama jika UMKM tidak memiliki strategi yang tepat untuk membedakan diri mereka dari pesaing.

7. Kurangnya Pengetahuan Tentang Pemasaran Online

Jika UMKM di Desa Gede Pangrango belum terbiasa dengan pemasaran online, mereka mungkin kehilangan peluang untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Pemasaran digital dapat membantu UMKM menembus pasar regional, nasional, atau bahkan internasional (Salam & Prathama, 2022).

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM Desa Gede Pangrango sangat penting untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah (Siti Nurhalita & Imsar, 2022):

1. Pemberian Pinjaman dan Modal Usaha

Pemerintah daerah dapat menyediakan program pinjaman dengan suku bunga rendah atau hibah modal usaha bagi UMKM. Ini akan membantu UMKM dalam mengatasi keterbatasan akses modal.

2. Peningkatan Akses Informasi

Pemerintah daerah dapat mendirikan pusat informasi UMKM yang memberikan akses kepada pelaku UMKM tentang berbagai peluang pasar, teknologi baru, pelatihan, dan program dukungan lainnya.

3. Program Pelatihan dan Pendidikan

Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelatihan dan program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan bisnis bagi pelaku UMKM.

4. Penembangan Pasar Lokal

Pemerintah daerah dapat mendukung pengembangan pasar lokal atau festival yang mempromosikan produk-produk UMKM setempat, membantu UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

5. Inkubator Bisnis dan Pusat Pelatihan

Membangun pusat inkubasi bisnis dan pusat pelatihan akan memberikan tempat bagi UMKM untuk belajar, berkolaborasi, dan mengembangkan usaha mereka.

6. Pengembangan Kemitraan

Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan organisasi lain untuk memberikan dukungan teknis dan finansial kepada UMKM.

7. Kolaborasi dan Jaringan

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan jaringan dan kolaborasi antara UMKM, institusi pendidikan, riset, dan lembaga keuangan. Kolaborasi ini dapat mendorong pertukaran pengetahuan, inovasi, dan peluang bisnis yang saling menguntungkan (Wilfarda et al., 2021).

8. Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah daerah perlu melakukan pemantaun dan evaluasi terhadap program-program dukungan UMKM yang telah diimplementasikan. Ini membantu mengukur dampak program, mengevaluasi keberhasilan, dan membuat perbaikan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.

Penting untuk ditelaah bahwa solusi yang efektif akan melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, UMKM, lembaga keuangan, serta berbagai pihak terkait lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai peran pemerintah daerah terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana pemerintah daerah dapat berperan dalam pengembangan UMKM di wilayah mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran pemerintah daerah, diharapkan dapat diambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat dukungan terhadap UMKM, sehingga berdampak positif pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

1. Dukungan regulasi dan kebijakan

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merancang regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Kebijakan yang ramah UMKM, seperti pemangkasan birokrasi, pembebasan pajak, akses lebih mudah ke permodalan, dan pelatihan bisnis, berpotensi mendorong perkembangan UMKM.

2. Alokasi Sumber Daya

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung UMKM. Ini meliputi alokasi anggaran untuk pelatihan, infrastruktur, pemasaran, dan akses ke teknologi. Dukungan dalam bentuk pembiayaan rendah atau bunga subsidi juga dapat membantu UMKM dalam mengatasi keterbatasan modal.

3. Fasilitas Akses ke Pasar

Pemerintah dapat berperan dalam membantu UMKM mengakses pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Ini bisa dilakukan melalui penyediaan sarana pameran, promosi produk, dan fasilitas kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah daerah dapat menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola bisnis. Pelatihan ini bisa mencakup manajemen, keuangan, pemasaran, dan teknologi. UMKM yang terampil akan lebih mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan pasar.

5. Pemberdayaan Perempuan dan Inklusi Sosial

Pemerintah daerah perlu memperhatikan inklusi sosial dan pemberdayaan perempuan dalam pengembangan UMKM. Dukungan khusus untuk UMKM yang dimiliki atau dikelola oleh perempuan dapat meningkatkan partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, M. A. (2021). PERAN PEMERINTAH DALAM MENYELAMATKAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI ERA PANDEMI COVID-19 (Sebuah Kajian dalam Perspektif Ekonomi Islam). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 81–104. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3552>
- Amelia, D., Setiaji, B., Primadewi, K., Habibah, U., Lounggina, T., Peny, L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., Setiaji, B., & Dharta, F. Y. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Chalim, M. A., Listyowati, P. R., Hanim, L., & Noorman, M. (2022). Peran Pemerintah

- Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan Pp No. 7 Tahun 2021. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 21–29. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1490>
- Fakhrurozi, M. (2023). Peranan Pemerintah dan Strategi Pemasaran terhadap Penjualan UMKM Ecoprint Yasmin Wiwid Lampung. *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(3), 1676–1686.
- Firman, M., Ginanjar, H., & Nugraha, D. (2022). Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Glenindo Citra Abadi Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 4(2), 161. <https://doi.org/10.32493/jee.v4i2.17114>
- Islami, N. W., Supanto, F., & Soeroyo, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Umkm Yang Terdampak Covid-19. *Karta Rahardja*, 2(1), 45–57.
- Masruroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Bagi Umkm Di Indonesia. *Journal of Innovation and Knowledge*, 1(1), 41–48. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/38>
- Moleong, J. L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. 32–36.
- Nugraha, D. (2023). Pengaruh metode simulasi demonstrasi terhadap hasil belajar mahasiswa. *Jurnal Pena Edukasi*, 10(1), 1–8.
- Nugraha, D., Ginanjar, H., & Rolina, R. (2018). Problem Solving Ability and Problem Based Learning. (*jiml*) *Journal of Innovative Mathematics Learning*, 1(3), 239. <https://doi.org/10.22460/jiml.v1i3.p239-243>
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–10.
- Rahmat, R., Busaeri, S. R., & Salim, M. (2020). Kajian Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Umkm Kuliner Di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. *Wiratani: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 3(2), 179. <https://doi.org/10.33096/wiratani.v3i2.65>
- Ramadhanti, A., Wahyuni, S., & Zulianto, M. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm Batik Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 16(1), 47–52. <https://doi.org/10.19184/jpe.v16i1.23452>
- Salam, M. D., & Prathama, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 137–143. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Siti Nurhalita, & Imsar. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Langkat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 84–90. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2282>
- Wilfarda, A. C., Ningtiyas, W. P., & Alimah, N. M. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 47–65.